

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa

Surahmat Musa<sup>1</sup>, Nurlinah<sup>2</sup>, Jayadi Nas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Administrasi Pembangunan, Universitas Hasanuddin.

E-mail : rahmatmemet21@yahoo.com

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisip, Universitas Hasanuddin.

<sup>3</sup> Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisip, Universitas Hasanuddin.

### ARTICLE INFO

**Keywords:** *The Role of the Government, the Brotherhood of Concerned Love Program, Community Welfare*

**Kata kunci:** *Peran Pemerintah, Program Persaudaraan Peduli Kasih, Kesejahteraan Masyarakat*

#### How to cite:

Musa, S., Nurlinah, & Nas, J. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 38-45.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the Role of Local Government in the Implementation of the Brotherhood of Love Concern Program in Mamasa District and analyze the level of community welfare after implementation. The research method used is a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and literature studies. The results of the study indicate that the Role of Regional Governments in the Implementation of the Brotherhood of Charity Care Program in Mamasa District is adequate in terms of Communication between SKPD and Community Groups. However, there are a number of things that must be further enhanced and considered in the management of poverty, namely more professional Human Resources. The level of welfare of the community after the implementation of the brotherly care program in Mamasa Regency is that the community is increasingly empowered, open employment, and has a significant impact by reducing the burden on poor families.*

#### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa serta menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa sudah memadai dalam hal Komunikasi antara SKPD dan Kelompok Masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang mesti lebih ditingkatkan dan diperhatikan dalam mengatasi kemiskinan, yakni Sumber Daya Manusia yang lebih profesional. Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa adalah masyarakat semakin berdaya, lapangan kerja terbuka, dan memberikan dampak yang signifikan dengan mengurangi beban bagi keluarga tidak mampu.*

Copyright © 2018 JAKPP. All rights reserved.

## Pendahuluan

Pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hubungan antar susunan pemerintahan mencakup aspek hubungan wewenang yang disusun berdasarkan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung pengertian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak dari pada program bantuan Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan yang secara nyata, belum dapat merubah angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Mamasa yang menjadi spirit bagi reforman untuk merancang sebuah gagasan perubahan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan penerapan “ Pola Persaudaraan Peduli Kasih “, dengan mempersaudarakan keluarga mampu dengan keluarga yang tidak mampu yang diklasifikasi enam aspek berdasarkan, Peraturan Bupati Mamasa Tentang Program Persaudaraan Peduli Kasih, yaitu :

- 1) Aspek lapangan kerja
- 2) Perumahan
- 3) Pendidikan dan Mental Spiritual
- 4) Pembinaan Rumah Tangga.
- 5) Ekonomi
- 6) Kesehatan

Persaudaraan Peduli Kasih adalah sebuah program pemerintah Kabupaten Mamasa untuk memperbaiki sistem ekonomi daerah. Kalau kita tinjau dari sisi etimologi persaudaraan terdiri atas 2 (dua) suku kata, persaudaraan dari kata saudara yang berarti orang yang bertalian sanak, persaudaraan adalah persahabatan karib layaknya seperti keluarga. Sedangkan Peduli Kasih adalah kepedulian kepada sesama berdasarkan kasih. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa persaudaraan Peduli Kasih adalah persaudaraan layaknya seperti sanak yang diberikan hak-hak atas dasar saling peduli dalam kasih. Seperti itulah program persaudaraan masyarakat Kabupaten Mamasa. Memberikan tanggungan kepada orang lain layaknya saudara atau keluarganya.

Dari gambaran Program Persaudaraan Peduli Kasih, Program ini mulai diterapkan di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yakni para kepala SKPD dengan pertimbangan bahwa para eselon II dan III sudah dinilai berada pada tataran keluarga yang mampu. Target Program Persaudaraan Peduli Kasih adalah seluruh Pimpinan SKPD sebanyak 37 SKPD, dan diharapkan program ini

akan dilanjutkan dengan mempersaudarakan kalangan BUMN / BUMD, Swasta dan warga secara umum yang sudah tergolong mapan dengan keluarga yang kurang mampu. Artinya bahwa semua yang dianggap mampu dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam program ini, wajib untuk terlibat dalam program pengentasan kemiskinan, agar program ini dapat sesuai dengan tujuannya. Namun sampai hari ini semua SKPD dan kalangan BUMN / BUMD, Swasta dan warga secara umum masih ada belum terlibat dalam program ini. Kerena sampai saat ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamasa masih belum mengurangi angka kemiskinan Kabupaten Mamasa, padahal program ini sudah berjalan selama 3 tahun.

Diketahui bahwa Kabupaten Mamasa merupakan salah satu contoh daerah dengan dukungan sumber daya hutan yang besar, namun termasuk pula daerah dengan penduduk miskin yang tidak sedikit. Kabupaten Mamasa terdiri dari kawasan hutan seluas 198.871 Ha atau 57,27% dari luas wilayah kabupaten. Meski demikian, luasnya kawasan hutan tidak menggambarkan hubungan positif terhadap penurunan jumlah keluarga/penduduk miskin di daerah ini. Sebagai gambaran, pada tahun 2014 BPS mempublikasikan data yang menggambarkan betapa daerah ini masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya di Indonesia. Daerah ini tercatat sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang masuk dalam kategori tertinggal bersama 122 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Meski meningkat pada tahun 2016 menjadi termiskin keempat di Sulawesi Barat, angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 16,25%. Tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi yaitu 21.293 KK Hasil Pendataan Tahun 2014 oleh BPS Kabupaten Mamasa. Jumlah tersebut menjadi fokus dalam program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Persaudaraan Peduli Kasih.

Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Mamasa masih tertinggi di Sulawesi Barat dengan angka 21,11 Persen, pada tahun 2016 terjadi kenaikan dengan capaian 21,43 persen. Sampai dengan data terakhir 2016 angka kemiskinan naik hingga 0,31%. Tingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kebijakan yang berpihak pada si miskin. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro masih belum tepat sasaran dan jumlah, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses.

Keluarga tidak mampu harus terlihat lebih berkembang baik pada aspek pendidikan yang dimana anak-anak disekolahkan dengan bantuan dari keluarga mampu atau yang terlibat dalam program Persaudaraan Peduli Kasih, pada aspek ekonomi bantuan kepada masyarakat miskin dibina dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk membentuk usaha kecil atau industry rumah tangga dan aspek kesehatan pemerintah daerah melalui program ini melakukan perbaikan gizi, kesehatan jiwa dan kesehatan mata untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pemeriksaan khusus terhadap masyarakat miskin, selain itu aspek tenaga kerja keluarga tidak mampu yang dianggap bisa bekerja dengan professional

dibina agar dapat bekerja ke sektor kegiatan yang produktif. Sehingga apa yang ingin di capai dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mamasa dapat memberikan dampak yang signifikan dengan adanya program Persaudaraan Peduli Kasih. Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa dan menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat hal ini dikarenakan Kabupaten Mamasa merupakan area lokus penelitian, dan daerah ini merupakan daerah dilaksanakannya program persaudaraan peduli kasih sejak tahun 2014. Dari penelitian ini peneliti berupaya melihat peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program ini, maka dari itu tempat dilaksanakannya penelitian ini di Kantor Bupati, Dinas Sosial, Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, dan SKPD terkait, sedangkan untuk proses terlaksananya program Persaudaraan Peduli Kasih peneliti juga melakukan penelitian kepada masyarakat yang telah terdaftar pada program Persaudaraan Peduli Kasih, peneliti melakukan penelitian di kecamatan Mambi dimana daerah jauh dari akses perkotaan dan kecamatan aralle daerah terpencil di Kabupaten Mamasa.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa, mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan Data Primer yang diperoleh melalui observasi sangat mendalam, dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan masyarakat, dan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai Pengentasan Kemiskinan melalui Program Persaudaraan Peduli Kasih Di Kabupaten Mamasa. Data Sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumentasi secara jeli yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Teknik penentuan informan dilakukan secara Purposive Sampling dimana penentuan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2012). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat Peran pemerintah daerah dalam program persaudaraan peduli kasih di kabupaten mamasa dan tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut : reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Dalam proses ini penulis juga menggunakan triangulasi data.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan program tersebut. Peneliti menemukan masih kurangnya SKPD dan BUMN/BUMD, Swasta terlibat dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa, masih ada masyarakat belum tersentuh dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih. Peneliti melihat masyarakat yang terkena program tersebut menemukan beberapa orang belum tergolong kategori miskin, serta adanya keluhan masyarakat terhadap program ini memberikan gambaran bagi peneliti untuk melihat lebih mendalam pelaksanaan program ini. Pada dasarnya peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seharusnya mendorong pertumbuhan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga dalam hal ini masyarakat dapat lebih mandiri dalam memanfaatkan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih, berkaitan dengan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa khususnya terkait komunikasi antar organisasi utamanya pemimpin SKPD sasaran awal program ini, setelah itu mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat, diantaranya lingkup tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan program ini harus mampu dalam proses pendampingan, baik dalam hal pengawasan atau kontroling yang dilakukan para pendamping program ini, sehingga kemampuan dan kecakapan dalam pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik. Disposisi oleh para pelaksana program harus memperhatikan hambatan-hambatan yang akan terjadi di lapangan, karena penanggung jawab atas berjalannya kebijakan dalam hal kesediaan dan komitmen para pendamping ini adalah bupati sebagai pemegang kendali dalam melaksanakan kebijakan ini, dengan harus memilih pendamping yang memiliki jiwa komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa. Secara teknis struktur organisasi dalam pelaksanaan program Persaudaraan Peduli Kasih, pemerintah Kabupaten Mamasa membentuk satu tim dari semua lembaga yang terlibat untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga kinerja kebijakan menjadi efektif di lapangan.

Dalam pelaksanaan program Persaudaraan Peduli Kasih peneliti menemukan 14 sampel yang dipersuadarkan antara keluarga mampu dengan keluarga tidak mampu sehingga hasil penelitian kebijakan program persaudaraan peduli kasih sudah berjalan dengan harapan keluarga tidak mampu dapat mengalami perubahan menjadi berdaya baik pada aspek ekonomi, aspek kesehatan dan aspek pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal lain dalam penelitian ini pada tingkat kesejahteraan pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mamasa memperdayakan masyarakat dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan membina secara khusus kepada keluarga yang terkena program ini, melalui pendamping yang telah di tugaskan di lapangan, selain itu pendamping program ini harus

memberikan motivasi terhadap keluarga tidak mampu agar lebih mandiri memanfaatkan bantuan program persaudaraan peduli kasih.

### **Kesimpulan**

Peran pemerintah dalam pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih belum terlaksana secara maksimal. Upaya penanggulangan kemiskinan yang sementara dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa belum terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya dapat menjalankan kebijakan ini, serta sarana dan prasarana yang tidak tersedia juga menjadi salah satu hambatan yang krusial dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Namun dalam komunikasinya terlihat pemerintah daerah melakukan sesuai dengan prosedurnya, dengan menjalankan sosialisasi, mulai dari tingkat SKPD sampai kepada masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat, keluarga tidak mampu di berdayakan oleh keluarga mampu dengan memberikan bantuan modal usaha, sarana kerja serta peluang kerja sehingga masyarakat miskin semakin berdaya. Hal tersebut memberikan kemandirian kepada masyarakat yang telah di bantu oleh keluarga mampu. Namun pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal dalam mengurangi kemiskinan. Belum maksimalnya disebabkan karena tidak semua pola pemberdayaan terpenuhi dalam pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa. Selain itu juga pemerintah daerah dalam menjalankan program ini tidak melakukan evaluasi kepada pendamping program ini, baik dalam hal penguatan kapasitas pendamping maupun hal-hal teknis yang dapat di temukan dilapangan sebagai tindak lanjut dari program Persaudaraan Peduli Kasih. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Perlu dilaksanakan pelatihan terhadap sumber daya manusia, sehingga dalam pelaksanaan program dapat mengawasi dan mengevaluasi program secara maksimal. Pemerintah daerah juga harusnya menyediakan fasilitas yang baik sebagai sarana keberlangsungan pengentasan kemiskinan, serta mencari sumber daya manusia lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah perlu mendata kembali keluarga tidak mampu dan keluarga mampu, sesuai kebutuhan masyarakat yang ingin diperdayakan, dengan pola pemberdayaan program Persaudaraan Peduli Kasih dari aspek perumahan, aspek kesejatan dan aspek pendidikan dan spiritual. Maka pemerintah daerah Kabupaten Mamasa perlu melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan program tersebut, dengan melakukan pendampingan serta penguatan SDM sehingga memunculkan SDM yang berkompeten serta mampu menjalankan program Persudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa secara maksimal sehingga tujuan utama dalam program ini mengurangi angka kemiskinan bisa tercapai.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solihin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunann Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asrinaldi. 2012. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Gava Media. Yogyakarta.
- Bappenas, 2007. *Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*. Jakarta. Badan Prencanaan Pembangunan Nasional.
- Dharma Setyawana S, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Erwan Agus Dkk, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta
- Ali, Faried., Nurlin. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama. Bandung.
- Sabarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Haryanto, dkk. 1997. *Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia*.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Gava Media. Jakarta
- Moleong. Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori Manajemen Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Prasojo, Eko., Kurniawan, Teguh., Holidin, Defny. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi; Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: YAPPKA.
- Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo. 1980. *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan Jilid 1*, Gajah Mada University Press.
- Sarundajang SH., 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung. CV Alfabeta.
- Soedjito, Irawan. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara. Jakarta.